

## BAGIAN IV

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### 1. KEBIJAKAN FISKAL DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan ekonomi makro tahun 2013 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terutama dengan meningkatkan investasi, perdagangan, hotel dan restoran serta mendorong daya saing industri dan nilai tambah industri untuk lebih dapat meningkatkan PDRB Kota Bogor. Investasi juga didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Bogor. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam meningkatkan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka menjadi 9,7 persen pada tahun 2013 dan mengintervensi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh dengan mengembangkan kegiatan utama (*core businesses*) industri kreatif potensi lokal serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi Kota Bogor diarahkan pada peningkatan nilai tambah segenap sumber daya ekonomi melalui pengembangan sektor perdagangan, sektor industri, hotel dan restoran, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, peluang investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguasaan informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis memperkuat kerjasama antar daerah sebagai salah satu upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

##### 1). Gambaran Kondisi Perekonomian Kota Bogor

Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*.

Gambaran tentang PDRB atas dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana tertuang dalam Buku PDRB 2012 terbitan Tahun 2013 yang disusun oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Bogor bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Bogor, adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Konstan (Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	2008	4.252.821,78 juta	6,09 %
2	2009	4.508.601,05 juta	5,98 %
3	2010	4.782.307,18 juta	6,01 %
4	2011	5.081.482,69 juta	6,07 %
5	2012	16.758.952.25 juta	6,31 %

## 2). Kebijakan Umum Anggaran

Perkiraan anggaran daerah Pemerintah Kota Bogor merupakan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bogor.

Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat serta swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### (1) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2013 diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2012 Pemerintah Kota Bogor, kebijakan anggaran tahun 2013 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya tersebut terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kota Bogor. Rencana pendapatan daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2013 diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun 2012 yaitu sebesar 12.90% atau sebesar Rp 197.547.659.635,00

Kecenderungan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan kondisi *existing* unit-unit penghasil Pemerintah Daerah juga menjadi bahan pertimbangan sebagai faktor koreksi terhadap rencana pendapatan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun 2013 antara lain meliputi :

- a) Pendapatan Asli daerah (PAD)
  - Target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu;
  - Dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang dapat memberatkan dunia usaha;
  - Rencana penerimaan dari penyertaan modal supaya disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan;
  - Supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.;
- b) Dana Perimbangan  
Pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2013 supaya melakukan proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan tahun anggaran 2012.
- c) Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah  
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada tahun anggaran 2013 menggunakan pagu tahun anggaran 2012.
- d) Menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana Bagi Hasil, Hibah, Dana Darurat, dan Sumbangan pihak ketiga pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah meliputi:

- a. Optimalisasi intensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

(2) Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2013 yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi:

- Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Acress maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); Memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok 10% dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah; Mengantisipasi pengangkatan CPNSD.

- Belanja Hibah

Pemberian hibah dilaksanakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemda yang dilakukan oleh pemerintah, semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemda lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Pemberian hibah dilengkapi dengan NPHD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dananya.

- Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada kelurahan diarahkan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan.
- Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2012 dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2013.

b. Belanja Langsung

Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.

Terhadap kegiatan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.

- Belanja Pegawai, merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.  
Penggangan honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan.  
Penggangan honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi pemerintah.
- Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2012 Belanja daerah tahun 2013 diupayakan dialokasikan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang menganut azas proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu kebijakan belanja diarahkan pada :

- a. Supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui Belanja Langsung (program dan kegiatan) dari pada Belanja Tidak Langsung.
- b. Penentuan alokasi anggaran belanja sejalan dengan prioritas pembangunan 2012 sebagai langkah berkelanjutan dalam upaya pencapaian dengan visi dan misi Kota Bogor;
- c. Pengalokasian anggaran sesuai dengan Tupoksi serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
- d. Penerapan alokasi belanja berbasis *output/outcomes*.

- e. Penerapan standar harga dan biaya dilakukan secara optimal agar terjadi efisiensi anggaran.
- f. Peningkatan efektivitas penggunaan dana *block grand* oleh masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan sinkronisasi implementasi antara rencana pembangunan Kota Bogor dengan masyarakat melalui kelurahan.

### (3) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi, dan dapat ditempuh melalui :

- a. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan semakin menurun sebagai akibat dari optimalnya penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Rata-rata SiLPA diupayakan maksimum 5 persen dari APBD tahun sebelumnya.
- b. Penerimaan pinjaman daerah dari dalam maupun luar negeri melalui bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik terutama pelayanan air minum.
- c. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, peruntukan waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sedangkan penerimaan hasil bunga/deviden dana cadangan dianggarkan pada rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

## 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2013 adalah :

- a. Penyesuaian penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal kepada BUMD diiringi dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
- b. Pembentukan dana cadangan untuk keperluan PEMILUKADA 2013

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Bogor mengacu pada :

1. Lampiran III Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Buku III - Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah),
2. Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor,
3. Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah hasil dari Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.355/KMK.07/2001.

Selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 : Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian laporan keuangan dengan mengacu pada aturan tersebut di atas berbeda dengan penyajian APBD Pemerintah Kota Bogor. Hal ini disebabkan penyajian APBD Pemerintah Kota Bogor mengacu kepada Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2007.

Kebijakan akuntansi yang penting disajikan dibawah ini :

- 1). Prinsip penyusunan Neraca Daerah sesuai dengan acuan tersebut di atas adalah prinsip substansi mendahului formalitas (*Substance over Form*).
- 2). Asas akuntansi yang digunakan dalam penyusunan neraca adalah kas yang dimodifikasi/akrual yang dimodifikasi (*modified cash basis/modified accrual basis*) atau disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).
- 3). Periode akuntansi yang digunakan adalah tahun anggaran.
- 4). Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

5). Pos-Pos Neraca

(1) ASET LANCAR

(1.1.) *Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran*

(1.1.1.) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

- *Kas di Kas Daerah* merupakan saldo kas pemerintah kota yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota.
- *Kas di Bendahara Pengeluaran* adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- *Kas di Bendahara Penerimaan* adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan kepada Bendahara Umum Daerah.

(1.1.2.) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(1.1.3.) Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

(1.2.) *Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR*

(1.2.1.) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(1.2.2.) Perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/D dan TGR dinilai sebesar nilai nominal.

(1.2.3.) Diakui pada saat timbulnya hak atas bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran tersebut.



(1.3.) *Piutang Pajak / Retribusi dan Piutang Lain-lain*

- (1.3.1.) *Piutang Pajak* merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (1.3.2.) *Piutang Retribusi* merupakan piutang yang diakui atas Retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (1.3.3.) *Piutang Lain-lain* adalah piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak.
- (1.3.4.) Perkiraan Piutang Pajak/Retribusi dan Piutang Lain-lain dinilai sebesar nilai nominal.
- (1.3.5.) Piutang pajak/retribusi dan piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut yaitu pada saat ditetapkan.

(1.4.) *Persediaan*

- (1.4.1.) *Persediaan* adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah kota dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- (1.4.2.) Jenis-jenis persediaan :
- *Persediaan Pakai Habis*, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya persediaan alat tulis kantor.
  - *Persediaan Tak Habis Pakai*, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali (selain persediaan pakai habis).
  - *Persediaan Bekas Pakai*, adalah persediaan dari komponen bekas, akan tetapi masih bermanfaat dan mempunyai nilai materil, misalnya suku cadang bekas.
  - *Persediaan untuk dijual*, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

(1.4.3.) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(1.4.4.) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

## (2) INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

(2.1.) *Investasi permanen* adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen terdiri dari :

(2.1.1.) Penyertaan modal/ekuitas dalam badan usaha milik negara/ daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara di dalam dan di luar negeri.

(2.1.2.) Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom lainnya dan pihak lainnya termasuk pinjaman dalam/luar negeri yang diteruspinjamkan.

(2.1.3.) Penanaman modal dalam pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga setelah kegiatan mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

(2.1.4.) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan yaitu semua biaya investasi permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu perkiraan investasi permanen di atas.

(2.2.) Investasi permanen dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

- (2.3) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen antara lain dapat berupa :
- (2.3.1.) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya.
  - (2.3.2.) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
  - (2.3.3.) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
  - (2.3.4.) Investasi nonpermanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
  - (2.3.5.) Investasi nonpermanen Pemerintah Kota Bogor yang berupa *Dana Bergulir* adalah Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas) berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada masyarakat/pengusaha kecil. Pengelolaan dana dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Walikota dengan PD BPR Bank Pasar sebagai penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan. Jumlah yang tercatat di neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang dapat tertagih.
- (2.4.) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal tersebut. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas lancar.

### (3) ASET TETAP

- (3.1.) *Aset tetap* adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kota atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh dari dana sebagian atau seluruh APBD baik melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

- (3.2.) Pengeluaran yang *dikapitalisasikan* dilakukan terhadap pengadaan tanah; pembelian peralatan, alat angkutan, mesin, dan bangunan; pembangunan gedung dan bangunan; pembangunan jalan/irigasi/ jaringan; serta penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur yang tidak termasuk pemeliharaan. Kebijakan atas besarnya pengeluaran yang harus dikapitalisasi, telah diberlakukan pada penyusunan laporan keuangan ini.
- (3.3.) *Penilaian* aset tetap adalah pemberian nilai pada aset tetap dalam bentuk satuan mata uang rupiah oleh pihak yang kompeten, untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan metode tertentu, sesuai dengan standar/prinsip yang telah ditetapkan yaitu dinyatakan dengan nilai historikal yaitu harga perolehan atau dilakukan estimasi *apabila* harga perolehan tidak didapatkan.
- (3.3.1.) Aset tetap dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan (Harga Pembelian/*Historical Cost*). Apabila dalam penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak dapat dilakukan, maka nilai aset tetap tersebut didasarkan harga perolehan yang diestimasi.
- (3.3.2.) Harga Perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan sampai aset tetap tersebut siap pakai.
- (3.3.3.) Apabila biaya perolehan aset tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tetap tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar pada saat perolehan.
- (3.3.4.) Hal yang mengubah nilai aset tetap adalah penambahan, pengurangan dan penggantian bagian utama.

- (3.3.5.) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah biaya pengurusan.
- (3.3.6.) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset tetap tersebut diperoleh ditambah biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung, dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- (3.3.7.) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset tetap ditambah biaya merubah apabila menambah umur ekonomis, kapasitas, dan manfaat.
- (3.3.8.) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- (3.3.9.) Penilaian Aset Tetap Yang Tidak Memiliki Data Harga Perolehan (*Historical Cost*). Apabila dalam penilaian aset tetap tidak diperoleh data/dokumen harga perolehannya misalnya karena aset tetap tersebut diperoleh dari hibah atau sumbangan maka penilaian aset tetap dilakukan dengan menggunakan nilai wajar saat aset tetap tersebut diperoleh.

#### (4) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari :

- (4.1.) *Tagihan Penjualan Angsuran* yang menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan Tagihan Angsuran Rumah dan Piutang Angsuran Penjualan Kendaraan dan tagihan angsuran lainnya.
- (4.2.) *Kemitraan dengan Pihak Ketiga* yang menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- (4.3.) *Built, Operate, and Transfer (BOT)* yang merupakan pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas di atas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian

menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendaagunaannya kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

- (4.4.) *Dana Cadangan* yang merupakan dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (4.5.) *Aset Lain-lain* yang merupakan aset di luar tagihan penjualan angsuran, Kemitraan dengan pihak ketiga dan Dana Cadangan antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalah-gunakan aset pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

#### (5) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- (5.1.) *Hutang Jangka Pendek* merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang lancar terdiri dari :
  - (5.1.1.) *Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo* yang merupakan sebagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
  - (5.1.2.) *Hutang Biaya Pinjaman* yang merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan hutang pokok, dapat berupa bunga, denda dan *commitment fee*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* karena telah menarik pinjaman dengan tarip suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo. Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
  - (5.1.3.) *Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)* adalah hutang jangka pendek kepada pihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(5.1.4.) *Hutang Jangka Pendek Lainnya* adalah hutang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut di atas.

(5.2.) Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.

(5.3.) Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya kewajiban atas hutang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapanannya.

#### (6) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

(6.1.) *Hutang Jangka Panjang* merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang Jangka Panjang terdiri dari :

(6.1.1.) Hutang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

(6.1.2.) *Hutang bunga* yang merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(6.2.) Hutang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

#### (7) EKUITAS DANA

##### (7.1.) *Ekuitas Dana Lancar*

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas :

(7.1.1.) SiLPA tahun pelaporan yang merupakan perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.

- (7.1.2.) Akumulasi SiLPA yang merupakan perkiraan yang menampung akumulasi saldo SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah dikurangi dengan penggunaannya dalam anggaran dan dinilai sebesar sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya.
- (7.1.3.) Cadangan Piutang yang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
- (7.1.4.) Cadangan Persediaan yang merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan, disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang dimiliki yang dinilai dengan harga beli terakhir/harga standar atau yang diestimasi.
- (7.1.5.) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek yang merupakan perkiraan lawan ekuitas dana lancar, jadi merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal hutang jangka pendek.

*(7.2.) Ekuitas Dana yang Diinvestasikan*

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan terdiri dari :

- (7.2.1.) Dana yang Diinvestasikan dalam Investasi Permanen yang merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang, dan dinilai sebesar nilai yang diinvestasikan dalam investasi permanen.
- (7.2.2.) Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap yang merupakan kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, dan dinilai sebesar nilai aset tetap.
- (7.2.3.) Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya yang merupakan ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya, dan dinilai sebesar nilai aset lainnya selain dana cadangan



**(7.3.) Ekuitas Dana yang Dicadangkan**

(7.3.1.) Ekuitas Dana yang Dicadangkan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggarannya.

(7.3.2.) Saldo perkiraan Dana yang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan dinilai sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan.

**3. PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****3.1. PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN****1). Pendapatan**

Realisasi pendapatan tahun 2013 sebesar Rp1.574.372.008.958,00 atau 102,79 % dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp1.531.669.272.454,00. Peningkatan pendapatan sebesar 2,79 % dari anggaran tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah kecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan bagi hasil Pemerintah Pusat. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**(1.1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp464.695.880.485,00 atau mencapai 115,98 % dari target pendapatan asli daerah tahun 2013 sebesar Rp400.676.068.667,00.

Pendapatan sebesar Rp464.695.880.485,00 tersebut terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp341.419.704.885,00 atau 116,44% dari target sebesar Rp293.204.300.000,00.
- Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp73.636.737.984,00 atau 108,11% dari target sebesar Rp68.112.362.491,00.
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp19.568.717.822,00 atau 98,73% dari target sebesar Rp19.819.537.320,00.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp30.070.719.794,00 atau 153,89% dari target sebesar Rp19.539.868.856,00.

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 341.419.704.885,00 terdiri dari:

• Pajak Hotel	Rp.	41.728.119.975,00
• Pajak Restoran	Rp.	50.035.057.749,00
• Pajak Hiburan	Rp.	15.776.049.233,00
• Pajak Reklame	Rp.	11.481.303.030,00
• Pajak Penerangan Jalan	Rp.	19.788.975.728,00
• Pajak Parkir	Rp.	5.797.071.513,00

• Pajak Air Bawah Tanah	Rp.	6.376.945.086,00
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp.	121.137.058.901,00
• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp.	69.299.123.670,00
	Rp.	<u>341.419.704.885,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp73.636.737.984,00 terdiri dari:

• Retribusi Jasa Umum	Rp.	20.715.711.527,00
• Retribusi Jasa Usaha	Rp.	4.583.527.540,00
• Retribusi Perizinan Tertentu	Rp.	48.337.498.917,00
	Rp.	<u>73.636.737.984,00</u>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp19.568.717.822,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yang terdiri dari:

• Bagian Laba dari PDAM Tirta Pakuan	Rp.	15.122.405.000,00
• Bagian Laba dari BPR Bank Pasar	Rp.	1.213.970.873,00
• Bagian Laba dari PT Bank Jabar	Rp.	3.199.843.801,00
• Bagian Laba dari PD. Pasar Pakuan Jaya	Rp.	32.498.148,00
	Rp.	<u>19.568.717.822,00</u>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp30.070.719.794,00 terdiri dari:

• Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	Rp.	219.633.210,00
• Penerimaan Jasa Giro	Rp.	11.187.993.661,00
• Bunga Atas Penerusan Pinjaman	Rp.	993.071.158,00
• Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp.	3.200.000,00
• Pendapatan Denda Pajak	Rp.	5.813.773.202,00
• Pendapatan Denda Retribusi	Rp.	102.451.000,00
• Pendapatan dari Pengembalian	Rp.	8.167.681.860,00
• Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	Rp.	96.153.008,00
• Jasa Pihak Ketiga	Rp.	3.486.762.695,00
	Rp.	<u>30.070.719.794,00</u>

## (1.2) Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2013 sebesar Rp1.082.269.784.197,00 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) sebesar Rp792.975.350.762,00 atau 99,06% dari target tahun 2013 sebesar Rp800.468.698.048,00, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp154.905.086.000,00 atau 100,00% dari target tahun 2013 sebesar Rp154.905.086.000,00, serta Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp134.389.347.435,00 atau 93,35% dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp143.970.324.139,00.

Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) sebesar Rp792.975.350.762,00 terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp62.177.975.480,00 atau 93,10% dari target sebesar Rp66.785.598.488,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari PBB, dan PPh Perseorangan/PPh 21.
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp24.608.953.282,00 atau 117,53% dari target sebesar Rp20.938.790.560,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh dari Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Alam, Hasil Hutan, Pertambangan Umum, dan Dana Alokasi Cukai.
- Dana Alokasi Umum sebesar Rp686.520.759.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp686.520.759.000,00.
- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp19.667.663.000,00 atau 75,00% dari target sebesar Rp26.223.550.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp154.905.086.000,00 terdiri dari:

- Dana penyesuaian pendidikan tambahan penghasilan guru PNS (tunjangan non-sertifikasi) dan tunjangan profesi guru PNSD (tunjangan sertifikasi).

Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp134.389.347.435,00 terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp134.389.347.435,00 atau 93,35% dari target sebesar Rp143.970.324.139,00. Pendapatan tersebut diperoleh dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp47.007.395.160,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp50.072.835.666,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp37.095.752.635,00, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPPABT) sebesar Rp152.879.096,00, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP) sebesar Rp60.484.878,00.

### (1.3) Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2013 adalah sebesar Rp27.406.344.276,00 atau mencapai 86,59% dari target sebesar Rp31.649.095.600,00. Realisasi sebesar tersebut merupakan:

- Hibah dari Pemerintah DKI melalui BKSP sebesar Rp4.999.850.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Kecamatan Tanah Sareal, Pembangunan Tembok Penahan Tanah Penunjang Kolam Retensi Ciluar dan Pembangunan Sumur Resapan
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp22.406.494.276,00 yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyelenggaraan SMP Terbuka
  2. Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD
  3. Vocational Award / Implementasi Teaching Factory
  4. Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SMP
  5. Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota JAMKESMAS di Kota Bogor
  6. Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Tegal Gundil
  7. Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Laboratorium Untuk Penyakit Menular dan Tidak Menular
  8. Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Sudirman dan Jl. Pajajaran
  9. Pembangunan Ruas Jalan R3 Section I Tahap II
  10. Peningkatan Jl. Cimanggu Permai Kel. Kedung Badak
  11. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Marga Jaya
  12. Pembangunan Tebingan di RT 08/10 Kel. Cikaret Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
  13. Pembangunan TPT RT 03, 02, 01 RW 05 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat
  14. Pembangunan saluran irigasi RT 04 RW 04 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara
  15. Pembangunan Talud Pemisah antara Kel. Kedungjaya dan Kel. Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
  16. Pekerjaan Jalan Lingkungan RT. 03, 04, 05 RW. 02 Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
  17. Pembuatan Talud Rawan Longsor dalam Pemukiman RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
  18. Pengaspalan Jalan Lingkungan Kp. Cilubang Tonggoh RT. 01 RW. 10 Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
  19. Pengaspalan Jalan Gg. Walet Kp. Semplak Kelurahan Bubulak dan Pembuatan Drainase Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

20. Perbaikan Jalan Lingkungan dan Drainase RW. 02. RW. 04 dan RW. 06 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur
21. Perbaikan Tanah Longsor diarea Permukiman Warga Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor
22. Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 03/09 Kelurahan Harjasari Kecamatan Bogor Selatan
23. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kel. Panaragan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor
24. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana UPTD BLK Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
25. Penataan Wisata Kuliner untuk Mendukung Destinasi Wisata Puncak Kec. Bogor Timur
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kemuning Gading Kota Bogor
27. Fasilitasi penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013
28. Pengiriman Peserta Healing Spritual Quotient (HSQ) Karyawan Pemerintah Kota Bogor
29. Rehab Gedung Kel. Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
30. Rehab Kantor Kelurahan Baranang Siang Kec. Bogor Timur, Bogor
31. Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian
32. Peningkatan Partisipasi Melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat
33. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS
34. Optimalisasi Rumah Potong Hewan Terpadu Kota Bogor

## 2). Belanja

Realisasi Belanja tahun 2013 adalah sebesar Rp1.421.277.460.779,00 atau 85,25% dari Anggaran Belanja tahun 2013 sebesar Rp1.667.270.527.875,00. Penghematan realisasi belanja tahun 2013 terdapat pada semua pos belanja, kecuali belanja transfer yang terealisasi 100%. Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

### (2.1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2013 adalah sebesar Rp1.193.376.604.650,00 atau 91,30% dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp1.307.051.564.000,00.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.193.376.604.650,00 terdiri dari:

- Belanja Pegawai sebesar Rp754.650.690.499,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar Rp802.070.310.974,00.

- Belanja Barang sebesar Rp349.545.992.987,00 atau 88,10% dari anggaran sebesar Rp396.747.767.170,00.
- Belanja Bunga sebesar Rp993.071.158,00 atau 19,47% dari anggaran sebesar Rp5.100.000.000,00.
- Hibah sebesar Rp66.125.573.760,00 atau 87,94% dari anggaran sebesar Rp75.193.194.310,00 merupakan hibah yang diberikan antara lain kepada **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** (antara lain: PKK, Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia), **Bidang Keolahragaan** (KONI, PORKAR), **Bidang Pendidikan** antara lain (Dewan Pendidikan Kota Bogor, Pramuka Kwartir Cabang Kota Bogor), **Bidang Kesehatan** (KPAD, Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor, PPMTI Kota Bogor, BNK), **Bidang Kepemudaan** (KNPI, Karang Taruna Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor), **Bidang Keagamaan** (antara lain: MUI, Nahdhatul Ulama PC Kota Bogor, DKM Masjid Raya Kota Bogor, DKM Masjid Attaqwa Balaikota Bogor, DKM Masjid Agung Bogor, BAZ Kota Bogor), **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik** (antara lain: KOMINDA, KPU Kota Bogor, Polres Bogor Kota, Pusedik Intel, Detasemen Polisi Militer III, Pengurus Cabang X.05 FKPI TNI Polri Kota), **Sosial Kemasyarakatan** (antara lain: Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemerintah, Persatuan Werdatama RI, Persatuan Isteri Veteran RI, PEPABRI, LVRI, Dharma Wanita Persatuan Kota Bogor, Wirawati Catur Panca Kota Bogor, PWI), **Bidang Kebudayaan dan Pariwisata** (Yayasan Museum Pembela Tanah Air (PETA), Yayasan Hajuang Bodas, Dewan Kesenian Kebudayaan Kota Bogor, Persatuan Pedalangan Indonesia, Dekranasda, Musium Pejuang Kota Bogor), **Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Hibah Dana BOS** (BOS SD Swasta, BOS SMP Swasta)
- Bantuan Sosial sebesar Rp22.061.276.246,00 atau 78,96% dari anggaran sebesar Rp27.940.291.546,00. Realisasi bantuan sosial digunakan dalam rangka pemberian bantuan bidang kemasyarakatan, bidang keagamaan, bidang keolahragaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bantuan parpol.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp754.650.690.499,00 terdiri dari:

• BTL-Gaji dan Tunjangan	Rp. 586.089.738.710,00
• BTL-Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 57.479.469.212,00
• BTL-Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp. 4.278.120.000,00
• BTL-Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 14.617.597.232,00
• BTL-Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 3.536.703.420,00
• BL-Honorarium PNS	Rp. 49.488.153.500,00

---

• BL-Honorarium Non-PNS	Rp.	27.836.413.900,00
• BL-Uang Lembur	Rp.	1.475.480.750,00
• BL-Honorarium Pengelolaan Dana BOS	Rp.	2.394.000.000,00
• BL-Belanja Pegawai BOS	Rp.	6.998.513.775,00
• BL-Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp.	415.000.000,00
• BL-Uang Makan	Rp.	41.500.000,00
	Rp.	<u>754.650.690.499,00</u>

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp349.545.992.987,00 terdiri dari:

• Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.	7.897.175.463,00
• Belanja Bahan/Material	Rp.	33.132.659.691,00
• Belanja Jasa Kantor	Rp.	65.892.515.915,00
• Belanja Premi Asuransi	Rp.	1.530.719.820,00
• Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp.	23.567.362.477,00
• Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.	10.254.303.630,00
• Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	Rp.	2.205.168.000,00
• Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp.	329.620.000,00
• Belanja Sewa Alat Berat	Rp.	2.876.500,00
• Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp.	2.274.643.500,00
• Belanja Makanan dan Minuman	Rp.	25.604.148.535,00
• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp.	1.900.125.772,00
• Belanja Pakaian Kerja	Rp.	2.296.521.320,00
• Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Rp.	660.366.750,00
• Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	31.899.871.467,00
• Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp.	78.400.000,00
• Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek PNS	Rp.	8.500.179.660,00
• Belanja Pemeliharaan	Rp.	27.648.067.027,00
• Belanja Jasa Konsultansi	Rp.	9.099.851.977,00
• Belanja Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp.	58.628.250,00
• Belanja Barang dan Jasa - BOS	Rp.	5.107.486.225,00
• Belanja Aset (Kapitalisasi & Bukan Aset Pemda)	Rp.	82.670.655.123,00

• Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp.	6.934.645.885,00
		349.545.992.987,00
	Rp.	349.545.992.987,00

Realisasi Hibah sebesar Rp66.125.573.760,00 merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp22.061.276.246,00,00 terdiri dari:

• Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Rp.	300.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	Rp.	21.675.545.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	Rp.	25.292.246,00
• Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana	Rp.	60.439.000,00
	Rp.	22.061.276.246,00

#### (2.2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2013 adalah sebesar Rp224.308.059.020,00 atau 65,11% dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp344.494.968.935,00.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp224.308.059.020,00 terdiri dari:

- Belanja Tanah sebesar Rp28.360.961.080,00 atau 37,05% dari anggaran sebesar Rp76.538.485.950,00.
- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.690.212.000,00 atau 91,19% dari anggaran sebesar Rp54.491.592.930,00.
- Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.585.240.138,00 atau 91,06% dari anggaran sebesar Rp79.713.888.518,00.
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp72.623.781.412,00 atau 57,55% dari anggaran sebesar Rp126.197.284.537,00.
- Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.047.864.390,00 atau 13,87% dari anggaran sebesar Rp7.553.717.000,00.

#### (2.3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2013 adalah sebesar Rp3.592.797.109,00 atau 22,85% dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp15.723.994.940,00. Realisasi tersebut digunakan untuk penanggulangan bencana alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Penanggulangan Kebakaran, Anak Terlantar, Orang Hanyut melalui Satlak Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang penanggulangan bencana



dan pengungsi. Selain itu, Belanja Tidak Terduga kepada DKP Kota Bogor untuk Penanggulangan Bencana Longsor di TPA Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

### 3). Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Belanja bagi hasil pendapatan lainnya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp854.910.327,00 atau mencapai 94,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00.

### 4). Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan tahun 2013 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor.

Realisasi pembiayaan neto tahun 2013 adalah sebesar Rp142.006.272.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### (4.1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2013 adalah sebesar Rp197.938.800.162,00. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp 167.060.005.481,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp30.407.146.681,00, dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp471.648.000,00

#### (4.2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2013 adalah sebesar Rp55.932.528.060,00. Jumlah tersebut merupakan Penyertaan modal pemda terdiri dari: penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp25.310.640.294,00, penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar Kota Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00, penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi sebesar Rp4.000.000.000,00, penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya Rp5.000.000.000,00, Pemberian Pinjaman Daerah Sebesar Rp936.048.000,00 Pembentukan dana cadangan Rp5.000.000.000,00 serta Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp5.685.839.766,00.

---

Berikut adalah Perhitungan Kas tahun 2013 dari Realisasi Anggaran

Realisasi Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	464.695.880.485,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.082.269.784.197,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp</u>	<u>27.406.344.276,00</u>
Jumlah a+b+c (I)	Rp	1.574.372.008.958,00

Realisasi Belanja:

a. Belanja Operasi	Rp	1.193.376.604.650,00
b. Belanja Modal	Rp	224.308.059.020,00
c. Belanja Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>3.592.797.109,00</u>
Jumlah a+b+c+d (II)	Rp	1.421.277.460.779,00

Realisasi Transfer :

a. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>854.910.327,00</u>
Jumlah a (III)	Rp	854.910.327,00

Surplus/ Defisit I-II-III (IV) Rp 152.239.637.852,00

Realisasi Pembiayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	197.938.800.162,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>55.932.528.060,00</u>
Pembiayaan Neto (V)	<u>Rp</u>	<u>142.006.272.102,00</u>
SiLPA (IV + V)	Rp	294.245.909.954,00

Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

**3.2. PENJELASAN POS-POS NERACA**

<b>1)</b>	<b>Kas di Kas Daerah .....</b>	<b>293.517.712.205,00</b>	<b>166.713.638.494,00</b>
	Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp293.517.712.205,00 dan Rp166.713.638.494,00		

Mutasi Kas di Kas Daerah selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012..... Rp 166.713.638.494,00  
 Penerimaan Kas..... Rp 1.613.832.372.350,00  
 Pengeluaran Kas..... (Rp 1.487.028.298.639,00)  
 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013..... Rp 293.517.712.205,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp293.517.712.205,00 telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank Jabar Banten Cabang Bogor.

*(Rincian Kas di Kas Daerah/BUD disajikan pada Lampiran 1a)*

<b>2)</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran .....</b>	<b>793.162.712,00</b>	<b>424.066.889,00</b>
-----------	---	-----------------------	-----------------------

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp793.162.712,00 dan Rp424.066.889,00.

Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Pencairan  
 SP2D..... Rp 1.487.028.298.639,00  
 Realisasi  
 SPJ..... (Rp 1.478.064.899.166,00)  
 Pengembalian  
 Selama thn 2013..(Rp 8.243.971.264,00)  
 Sisa UYHD per 31  
 Desember 2013..... Rp 719.428.209,00  
 Sisa UYHD per 31  
 Desember 2012.....Rp. 8.769.540,00  
 Jasa Giro Bendahara  
 Pengeluaran.....Rp 0,00  
 Saldo Pajak.. Rp 60.864.840,00  
 Jasa Giro..... Rp. 4.100.123,00  
 Jumlah.....Rp 793.162.712,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp793.162.712,00 terdiri dari:

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

Dinas Pendidikan	Rp.	121.046.795,00
Dinas Kesehatan	Rp.	4.030.420,00
DKP	Rp.	589.630.474,00
Koperasi UMKM	Rp.	15.510.012,00
Sekretariat Daerah	Rp.	2.143.122,00
Sekretariat Korpri	Rp.	13.500.000,00
Kec. Bogor Selatan	Rp.	26.640.250,00
Kantor Kominfo	Rp.	20.661.639,00

telah sesuai dengan hasil verifikasi pada masing-masing SKPD. Sisa UP Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp66.590.566,00 dan Rp15.839.616,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tanggal 17 Maret 2014. Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak dapat merinci pengembalian sisa Panjar untuk masing-masing kegiatan. Sedangkan sisa UYHD Pajak 2013 dengan total Rp28.280.539,00, dimana sebesar Rp21.540.135,00 baru selesai disetorkan pada tanggal 28 february 2014. Sedangkan sisanya sebesar Rp6.740.404,00, belum terdapat bukti pertanggungjawabannya.

*(Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 1b)*

**3) Kas di Bendahara Penerimaan** **5.575.072,00** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp5.575.072,00 dan (nihil)

*(Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Disajikan pada Lampiran 1c)*

**4) Piutang Pajak Daerah .....** **188.453.383.305,00** **771.905.446,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 Rp188.453.383.305,00 dan Rp771.905.446,00 adalah penetapan pajak daerah yang belum diterima pembayarannya. Saldo tersebut terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Jumlah sebesar Rp188.453.383.305,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel.....	Rp	6.418.500,00
- Pajak Restoran .....	Rp	125.755.098,00
- Pajak Hiburan.....	Rp	1.293.861.150,00
- Pajak Parkir .....	Rp	64.255.000,00
- Pajak Reklame.....	Rp	73.799.782,00
- Pajak Air Tanah .....	Rp	169.935.124,00
- PBB P2 .....	Rp	186.719.358.651,00
Jumlah.....	Rp	188.453.383.305,00

*(Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan pada Lampiran 2a)*

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
<b>5) Piutang Retribusi Daerah .....</b>	<b>1.629.489.149,15</b>	<b>1.490.777.483,15</b>
Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp1.629.489.149,15 dan Rp1.490.777.483,15 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Jumlah sebesar Rp1.629.489.149,15 merupakan piutang retribusi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) yang terdiri dari:		
- Piutang Retribusi IMB.....	Rp 1.268.651.300,15	
- Piutang Retribusi HO... ..	Rp 189.548.803,00	
- Piutang Retribusi PPTR....	<u>Rp 171.289.046,00</u>	
- Jumlah .....	Rp 1.629.489.149,15	
<i>(Rincian Piutang Retribusi disajikan pada Lampiran 2b)</i>		
<b>6) Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi .....</b>	<b>18.721.968.738,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp18.721.968.738,00 dan Rp0,00 adalah nilai Piutang pendapatan bagi hasil provinsi sesuai lampiran keputusan Gubernur Jawa Barat No. 973/Kep.588-Keu/2014 tanggal 24 April 2014 yang terdiri dari:		
- Piutang PKB .....	Rp 5.940.674.025,00	
- Piutang BBNKB.....	Rp 9.229.218.840,00	
- Piutang PBBKB .....	Rp 3.519.119.278,00	
- Piutang APER.....	Rp. 19.743.150,00	
- Piutang Kemetrolagian....	<u>Rp. 13.213.445,00</u>	
- Jumlah .....	Rp 18.721.968.738,00	
<i>(Rincian Piutang Pendapatan Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 2c)</i>		
<b>7) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....</b>	<b>2.724.308.866,00</b>	<b>3.040.095.084,00</b>
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp2.724.308.866,00 dan Rp3.040.095.084,00 tersebut merupakan piutang atas penjualan angsuran rumah golongan III, kendaraan roda dua dan roda empat, eks tanah sewa dan kios Pasar Kebon Kembang. Mutasi selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atas seluruh Tagihan Penjualan Angsuran (Bagian Lancar) terdiri dari:		
- Saldo per 31 Desember 2012 .....	Rp3.040.095.084,00	
- Koreksi Saldo Awal.....	Rp 0,00	
- Angsuran tahun 2013 .....	<u>(Rp 315.786.218,00)</u>	
- Saldo per 31 Desember 2013 .....	Rp2.724.308.866,00	
- Bagian Jangka Panjang....	<u>(Rp 0,00)</u>	
- Saldo Bagian Lancar .....	Rp 2.724.308.866,00	

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

Saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp2.724.308.866,00 terdiri dari:

- Rumah Golongan III .....	Rp	5.491.595,00	
- Kendaraan Roda Dua .....	Rp	4.642.470,00	
- Kendaraan Roda Empat ...	Rp	15.442.500,00	
- Tanah eks tanah sewa:			
Kebon Pedes .....	Rp	102.681.076,00	
Babakan Pasar .....	Rp	230.584.923,00	
Sukasari .....	Rp	1.859.561.088,00	
Jumlah.....	Rp	2.192.827.087,00	
- Kios/Los Pasar Kebon Kembang:			
Basement .....	Rp	267.375.742,00	
Lantai Dasar .....	Rp	128.829.472,00	
Lantai I .....	Rp	109.700.000,00	
Jumlah.....	Rp.	505.905.214,00	
Jumlah Total.....	Rp	2.724.308.866,00	

*(Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan pada Lampiran 3a)*

**8) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan .....** **33.762.181,00**      **33.762.181,00**

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2013 dan 2012 senilai Rp33.762.181,00 dan Rp33.762.181,00 adalah tuntutan perbendaharaan atas kasus-kasus penyalahgunaan wewenang.

*(Rincian Tuntutan Perbendaharaan disajikan pada Lampiran 4a)*

**9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) .....** **192.338.500,00**      **195.538.500,00**

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012 senilai Rp192.338.500,00 dan Rp195.538.500,00 adalah tuntutan ganti rugi atas kasus-kasus kehilangan aset Pemerintah Kota Bogor. Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2012 .....	Rp	195.538.500,00	
- Penambahan 2013.....	Rp	0,00	
	Rp	195.538.500,00	
- Pembayaran tahun 2013 ..	(Rp)	3.200.000,00)	
- Saldo per 31 Desember 2013 .....	Rp	192.338.500,00	

*(Rincian Tuntutan Ganti Rugi disajikan pada Lampiran 4b)*

Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

---

**10) Piutang Lainnya ..... 152.385.530.380,25 48.474.718.865,34**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp152.385.530.380,25 dan Rp48.474.718.865,3. Mutasi selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 terdiri dari:

- Saldo awal.....	Rp 48.474.718.865,34
- Penambahan .....	<u>Rp105.827.921.031,91</u>
	Rp154.302.639.897,25
- Pengurangan .....	<u>(Rp 1.917.109.517,00)</u>
- Saldo akhir.....	Rp 152.385.530.380,25

Saldo akhir sebesar Rp152.385.530.380,25 terdiri dari:

- Piutang Hasil Pemeriksaan-an (Temuan) BPK-RI.....	Rp 10.140.927.594,98
- Piutang Denda Keterlambatan	
1. Pajak Daerah.....	Rp 75.867.977.953,26
2. Retribusi Daerah.....	Rp 313.921.241,20
- Biaya Dibayar Dimuka.....	Rp 813.225.348,41
- Piutang atas Penggunaan Langsung Pendapatan untuk Operasional Kantor....	Rp 30.000.000,00
- Dana Talangan Raskin.....	Rp 936.048.000,00
- Pemutusan Kontrak Konsultan (PT Indocitra).....	Rp 63.100.000,00
- Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank).....	Rp 64.212.950.948,00
- Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM tahun 2010 yang kurang disetor tahun 2011.....	Rp 88,40
- Pengembalian Gaji PNS Lebih Bayar.....	<u>Rp 7.379.206,00</u>
Jumlah.....	Rp 152.385.530.380,25

Piutang hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp10.140.927.594,98 merupakan piutang yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004).

Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 sebesar Rp813.225.348,41 merupakan beban asuransi Kendaraan Bermotor pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), asuransi kendaraan dinas operasional, asuransi kesehatan anggota DPRD pada Sekretariat DPRD, asuransi bangunan property all risk, asuransi

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

kendaraan bermotor, dan asuransi gempa bumi pada BPKAD, Asuransi Kendaraan Bermotor, Civil Engineering Completed Risk dan Electronic Equipment pada Kantor Komunikasi dan Informatika, Asuransi Akseptor KB pada BPMKB, Billboard Insurance pada Dinas Kesehatan, Asuransi kendaraan bermotor pada Sekretariat daerah dan Asuransi Kendaraan bermotor pada Inspektorat yang seluruhnya akan jatuh tempo tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- Asuransi Kendaraan bermotor pemakaman pada BKPP .....	Rp	2.931.506,85
- Asuransi kendaraan dinas operasional, asuransi kendaraan Sekretariat DPRD asuransi kesehatan anggota DPRD pada Sekretariat DPRD .....	Rp	176.976.261,92
- Asuransi bangunan property all risk, polis earthquake dan endosrment pada BPKAD	Rp	600.225.614,03
- Polis Asuransi Civil engineering Completed, Electronic Equipment dan Kendaraan Bermotor pada Kominfo.....	Rp	16.481.685,15
- Asuransi Akseptor KB pada BPMKB	Rp.	2.567.213,11
- Billboard Insurance pada Dinas Kesehatan	Rp.	966.661,75
- Asuransi Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Daerah	Rp.	5.992.422,95
- Asuransi Kendaraan bermotor pada Inspektorat	Rp.	7.083.982,65
- Jumlah.....	Rp	813.225.348,41

Piutang atas Penggunaan Langsung Pendapatan untuk Operasional Kantor sebesar Rp30.000.000,00 merupakan tagihan yang timbul dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2010 sesuai Surat Pernyataan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan sampai saat ini belum ada penetapannya. Piutang tersebut merupakan penggunaan langsung pendapatan kontribusi PT Bina Citra atas pengelolaan Plaza Bogor untuk kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar.

Piutang Pemutusan Kontrak Konsultan sebesar Rp63.100.000,00 merupakan pemutusan kontrak



Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

dengan PT Indocitra sebagai konsultan perencana pada kegiatan DED Optimalisasi Terminal Baranang Siang. Jumlah tersebut merupakan sisa yang harus disetorkan ke kas daerah berupa uang muka dan denda keterlambatan.

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development* No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan *Urban Water Supply and Sanitation Project*. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2013 sudah terjadi beberapa kali penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat yang secara keseluruhan sebesar Rp64.212.950.948,00.

Piutang kepada PDAM TP terkait kekurangan setoran bagian laba PDAM tahun 2010 yang diterima Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2011 sebesar Rp88,40.

*(Rincian Piutang Lainnya disajikan pada Lampiran 4c)*

**11) Persediaan .....15.281.768.743,00 9.957.775.980,89**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp15.281.768.743,00 dan Rp9.957.775.980,89. Jumlah tersebut merupakan persediaan yang ada pada seluruh SKPD. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2013 adalah sebagai Berikut:

- Persediaan habis pakai	Rp	4.415.702.516,00
- Persediaan tak habis pakai	Rp	0,00
- Persediaan bekas pakai....	Rp	0,00
- Persediaan untuk dijual/ disalurkan.....	Rp	10.866.066.227,00
Jumlah.....	Rp	15.281.768.743,00

Persediaan habis pakai per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.415.702.516,00 merupakan persediaan alat tulis kantor (ATK) dan persediaan habis pakai lainnya pada SKPD-SKPD.

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

Persediaan untuk dijual/dialurkan sejumlah		
Rp10.866.066.227,00 terdiri dari:		
- Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan.....	Rp	8.894.921.878,00
- Persediaan Alat Kontrasepsi/Non-Kontrasepsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana .....	Rp	324.893.058,00
- Persediaan Blanko KTP dan KK pada Dinas Dukcapil dan pada Kantor Kecamatan .....	Rp	688.260.166,00
- Persediaan Tanaman pada Dinas Pertanian.....	Rp	5.438.000,00
- Persediaan Hewan pada Dinas Pertanian.....	Rp	950.000,00
- Persediaan Aspal dan Bahan/Material pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.....	Rp	<u>951.603.125,00</u>
Jumlah .....	Rp	10.866.066.227,00

(Rincian Persediaan pada Lampiran 5)

12) Investasi Non-Permanen .....	63.742.100,00	63.742.100,00
----------------------------------	---------------	---------------

Saldo Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00 berbentuk dana bergulir.

Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2013 sebesar Rp63.742.100,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

(Rincian disajikan pada Lampiran 6)

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2000 .....	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2001 .....	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2002 .....	Rp	550.000.000,00
- Tahun 2003 .....	Rp	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	<u>1.750.000.000,00</u>

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Walikota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil),

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

BPR Bank Pasar berfungsi sebagai lembaga penyalur dana dan penampung angsuran/pelunasan. Dari jumlah Rp1.750.000.000,00 digunakan untuk acara seremonial pencairan Garda Emas oleh Pemda sebesar Rp15.000.000,00 dan yang disalurkan ke masyarakat, berjumlah Rp1.735.000.000,00.

Berdasarkan data Rekapitulasi Tingkat Pengembalian Dana Bergulir Garda Emas dan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Prosus Taskin Garda Emas bulan Desember 2007 (dari PINBUK), sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah dana yang telah disalurkan, termasuk eks proyek/prosus taskin pada dinas (penyaluran oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial/BPMPS dan Dinas Perindagkop), serta dana yang digulirkan kembali dari pengembalian masyarakat, jumlah dana bergulir telah berkembang menjadi sebesar Rp6.115.584.678,00. Sejak tahun 2008 tidak ada lagi perguliran dana dari pengembalian dana bergulir. Saldo dana bergulir yang ada di masyarakat per 31 Desember 2009 terdiri dari 2 kategori, yaitu dana bergulir dengan kondisi macet sebesar Rp2.247.224.411,00 dan dana bergulir dengan kondisi masih dapat tertagih sebesar Rp63.742.100,00.

Terhadap dana bergulir dengan kondisi macet, sebagian debitor sedang diupayakan dilakukan proses penagihan/penghapusannya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

**13) Investasi Permanen ..... 327.118.647.593,15      283.235.753.921,02**

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp327.118.647.593,15 dan Rp 283.235.753.921,02 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bogor pada PT Bank Jabar, BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi dan PD Pasar Pakuan Jaya.

Selama tahun 2013 terdapat penambahan modal disetor tunai sebesar Rp44.310.640.294,00 yang terdiri dari:

- Setoran modal pada PD Bank Pasar.....	Rp	10.000.000.000,00
- Setoran modal pada PDAM Kota Bogor.....	Rp	25.310.640.294,00
- Setoran modal PD Jasa Transportasi .....	Rp	4.000.000.000,00
- Setoran modal PD Pasar Pakuan jaya .....	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>44.310.640.294,00</u>

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau *Cost Method* dan Metode Ekuitas atau *Equity Method*. Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Dengan penambahan modal disetor tunai sebesar Rp 44.310.640.294,00 seperti tersebut di atas maka seluruh modal yang telah disetor kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Modal yang telah disetor pada PD BPR Bank Pasar ..	Rp	28.559.573.701,42
- Modal yang telah disetor pada PT Bank Jabar.....	Rp	11.684.452.323,00
- Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor ....	Rp	162.331.559.353,51
- Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi .....	Rp	9.669.314.655,91
- Modal yang telah disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	Rp	114.873.747.559,31
Jumlah .....	Rp	327.118.647.593,15

(Rincian Penyertaan Modal disajikan pada Lampiran 7)

Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp11.684.452.323,00 merupakan setoran modal tunai sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian:

- Saldo Awal Penyertaan Modal 31 Des 2012 .....	Rp	11.684.452.323,00
- Modal disetor tahun 2013	Rp	0,00
Jumlah.....	Rp	11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota tidak menyertakan modalnya ke PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah *Go Public*.

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Pasar ditetapkan menjadi Rp 30.000.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar sebesar Rp28.559.573.701,42 terdiri dari:

- Saldo Investasi 2012 .....	Rp	18.398.674.866,82
- Penyertaan Modal 2013.....	Rp	10.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas(40% x Laba Bersih 2013) .....	Rp	1.385.249.481,58
Jumlah .....	Rp	29.783.924.348,40
- Penyesuaian Laba/(rugi) tahun 2013 .....	(Rp.	10.379.773,98)
- Penerimaan bagian laba tunai tahun 2012 diterima tahun 2013 sebesar .....	(Rp	1.213.970.873,00)
Saldo per 31 Desember 2013 .....	Rp	28.559.573.701,42

Laporan Keuangan PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2013 sudah di audit oleh Auditor independen dari KAP Ellya Noorlisyati dan Rekan (*Registered Public Accountant*).

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp 182.000.000.000,00.

Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp162.331.559.353,51.

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

---

Penyertaan modal pada PDAM Kota Bogor terdiri dari:

- Saldo Investasi 2012 .....	Rp	134.491.876.103,84
- Penyertaan Modal tahun 2013.....	Rp	25.310.640.294,00
- Penambah Ekuitas(55% x Laba Bersih 2013) .....	Rp	<u>19.918.565.545,28</u>
Jumlah .....	Rp	179.721.081.943,12
- Penyesuaian Laba/ (Rugi) Tahun 2013.....	(Rp.	2.267.117.589,61)
- Penerimaan bagian laba tunai tahun 2012 diterima tahun 2013 sebesar .....	(Rp	<u>15.122.405.000,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2013.....	Rp	162.331.559.353,51

Laporan Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 31 Desember 2013 sudah di audit oleh Auditor independen dari KAP Drs. Haryo Tienmar (*Registered Public Accountant*).

#### Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan sebesar Rp9.669.314.655,91 terdiri dari:

- Saldo Investasi 2012 .....	Rp	10.720.874.621,91
- Penyertaan Modal tahun 2013 .....	Rp	4.000.000.000,00
- Rugi tahun 2013 .....	(Rp	<u>5.051.559.966,00)</u>
Jumlah.....	Rp	9.669.314.655,91

Nilai penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.669.314.655,91 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor independen.

#### Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00.
- Tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp233.279.924.240,00.

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang sebesar Rp 5.000.000.000,00
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan senilai Rp100.361.083.000,00
- Peralatan dan Mesin senilai Rp127.049.240,00

Sisa penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40.000.000.000,00 akan dianggarkan dan dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyertaan Modal berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin telah diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar Pakuan Jaya tetapi secara formal belum disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset.

Penyertaan sebesar Rp114.873.747.559,31 terdiri dari:

- Saldo Investasi 2012 .....	Rp	107.939.876.005,45
- Penyertaan Modal tahun 2013 .....	Rp	5.000.000.000,00
- Penambah ekuitas (55%xLaba tahun 2013) ...	Rp	<u>1.966.369.701,86</u>
- Jumlah .....	Rp	114.906.245.707,31
- Penerimaan bagian laba tunai tahun 2012 diterima tahun 2013 sebesar .....	(Rp)	<u>32.498.148,00</u>
Saldo Investasi 2013.....	Rp	114.873.747.559,31

Nilai penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2013 sebesar Rp114.873.747.559,31 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor independen.

**14) ASET TETAP ..... 4.293.251.424.738,00 3.853.225.866.150,00**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 berjumlah Rp4.293.251.424.738,00 dan Rp3.853.225.866.150,00. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 terdiri dari:

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

---

- Saldo per 31 Desember 2012 .....	Rp	3.853.225.866.150,00
- Penambahan .....	Rp	555.895.671.326,00
- Pengurangan .....	(Rp)	<u>115.870.112.738,00</u>
- Saldo per 31 Desember 2013 .....	Rp	4.293.251.424.738,00

Aset Tetap Pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.293.251.424.738,00 terdiri dari:

- Tanah .....	Rp	2.630.718.563.103,00
- Peralatan dan Mesin ....	Rp	282.725.477.379,00
- Gedung dan Bangunan .	Rp	555.795.536.617,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	Rp	808.548.272.711,00
- Aset Tetap Lainnya .....	Rp	10.971.683.772,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	<u>4.491.891.156,00</u>
Jumlah .....	Rp	4.293.251.424.738,00

Mutasi penambahan aset tetap selama tahun 2013 sebesar Rp555.895.671.326,00 merupakan penambahan aset tetap pada seluruh SKPD yang berasal dari:

- Pengadaan APBD (BM) ..	Rp.	224.617.413.020,00
- Belanja Operasi .....	Rp.	4.865.813.805,00
- Hibah dan APBN .....	Rp	219.478.889.800,00
- Droping .....	Rp.	1.662.654.667,00
- Reklasifikasi.....	Rp.	33.573.221.589,00
- DAK.....	Rp.	691.549.295,00
- Koreksi atas aset tetap yang belum tercatat pada neraca .....	Rp	<u>71.006.129.150,00</u>
Jumlah .....	Rp	555.895.671.326,00

Sedangkan mutasi pengurang Aset Tetap selama tahun 2013 adalah sebesar Rp115.870.112.738,00 dengan rincian:

- Reklasifikasi.....	Rp.	91.916.129.127,00
- Droping.....	Rp.	1.662.654.667,00
- Tidak Menjadi Aset .....	Rp.	4.151.909.073,00
- Diberikan kepada Swasta/Masyarakat .....	Rp.	2.599.699.120,00
- Dum .....	Rp.	693.750.000,00
- Penghapusan TPTGR ...	Rp.	21.216.662,00
- Penghapusan .....	Rp.	770.010.000,00
- Menjadi Rusak Berat ...	Rp.	<u>14.054.744.089,00</u>
Jumlah .....	Rp	115.870.112.738,00

(Rincian mutasi Aset Tetap disajikan pada Lampiran 9a, Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Lampiran 9b)



	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

---

<b>15) DANA CADANGAN.....</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
-------------------------------	-------------	--------------------------

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp0,00 dan Rp25.000.000.000,00 merupakan pembentukan dana cadangan yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka Bank Jabar. Saldo per 31 Desember 2013 adalah Rp0,00 dengan rincian mutasi dana cadangan adalah sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2012		Rp25.000.000.000,00
- Penambahan pembentukan		
an	Rp	5.000.000.000,00
- Bunga Deposito	Rp	407.146.681,00
- Pengurangan/pencairan	(Rp)	<u>30.407.146.681,00</u>
Saldo per 31 Desember 2013	Rp	0,00

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp30.000.000.000,00.

Pembentukan dana cadangan tersebut dilakukan melalui tiga tahap yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp15.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 931/00331/LS/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan Rp10.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 931/002799/LS/2012 tanggal 04 Desember 2012 serta tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 931/000003/LS/2013 tanggal 30 Januari 2013.

Pembentukan Dana Cadangan tersebut untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

<b>16) ASET LAINNYA .....</b>	<b>143.860.390.848,00</b>	<b>84.512.795.380,00</b>
-------------------------------	---------------------------	--------------------------

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah senilai Rp143.860.390.848,00 dan Rp84.512.795.380,00 dan. Jumlah tersebut merupakan aset di luar yang telah diuraikan sebelumnya yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp143.860.390.848,00 terdiri dari:

- Tuntutan Ganti Rugi.....		Rp 5.925.000,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....		
Ketiga.....	Rp	127.940.052.768,00
- Aset Tak Berwujud .....	Rp	6.091.310.880,00
- Aset Rusak Berat .....	Rp	<u>9.823.102.200,00</u>
Jumlah .....	Rp	143.860.390.848,00

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)

Per  
31 Desember 2012  
(Rp)

- *Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp127.940.052.768,00 merupakan Built, Operate, and Transfer (BOT) tanah milik Pemerintah Kota Bogor seluas 122.940 m<sup>2</sup> yang digunakan dan di atasnya dibangun gedung oleh pihak ketiga. Bangunan di atas tanah tersebut akan menjadi milik Pemerintah Kota Bogor setelah melampaui kurun waktu tertentu (antara 20 hingga 30 tahun). Mutasi sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:*

- Saldo per 31 Desember 2012 (100.139 m <sup>2</sup> )	.....	Rp	70.583.504.310,00
- Penambahan	.....	Rp	<u>57.356.548.458,00</u>
Saldo per 31 Desember 2013	.....	Rp	127.940.052.768,00

*(Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Lampiran 10a)*

- *Aset Tak Berwujud sebesar Rp6.091.310.310.880,00 adalah Aset berupa perangkat lunak/sistem/aplikasi, hak cipta, serta hak paten yang masih digunakan atau dioperasikan Pemerintah Kota Bogor.*

- Saldo per 31 Desember 2012	.....	Rp	4.366.021.300,00
- Penambahan	.....	Rp	<u>1.725.289.580,00</u>
Saldo per 31 Desember 2013	.....	Rp	6.091.310.880,00

Saldo sebesar Rp 6.091.310.880,00 terdiri dari :

- Perangkat Lunak/Sistem/Aplikasi	.....	Rp	6.091.310.880,00
- Hak Cipta	.....	Rp	0,00
- Hak Paten	.....	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	.....	Rp	6.091.310.880,00

*(Rincian disajikan pada lampiran 8c)*

- *Aset Rusak Berat sebesar Rp9.823.102.200,00 adalah aset tetap dengan kondisi rusak berat berdasarkan hasil Sensus Barang tahun 2013. Untuk mutasi tahun 2013 adalah sebagai berikut:*

Saldo per 31 Desember 2012	.....	Rp	9.557.344.770,00
Penambahan	.....	Rp	14.054.244.089,00
Pengurangan	.....	Rp	<u>(13.788.486.659,00)</u>
Saldo per 31 Desember 2013	.....	Rp	9.823.102.200,00

*(Rincian disajikan pada lampiran 8d)*

Per  
31 Desember 2013  
(Rp)Per  
31 Desember 2012  
(Rp)**17) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK .....313.534.802,00                   5.763.472.667,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp313.534.802,00 dan Rp5.763.472.667,00 Jumlah tersebut terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang terdiri dari pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pada:

1.	Dinas Pendidikan	Rp.	45.686.689,00
2.	Sekretariat daerah	Rp.	1.678.151,00
3.	Sekretariat Korpri	Rp.	13.500.000,00
	Jumlah	Rp.	60.864.840,00

- Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

1.	Dinas Kesehatan	Rp.	12.500.000,00
2.	Wasbangkim: - 2012 - 2013	Rp.	53.110.000,00
		Rp.	96.883.662,00
3.	Dinas Pendidikan	Rp.	55.138.300,00
4.	Kecamatan Bogor Selatan	Rp.	35.038.000,00
	Jumlah	Rp.	252.669.962,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek      Rp      313.534.802,00

*(Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Lampiran 11)*

**18) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG .....64.212.950.948,00                   35.851.828.078,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2013 adalah Rp64.212.950.948,00 dan 2012 adalah Rp35.851.828.078,00 .

Hutang Jangka Panjang berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerimaan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor : SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman

Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumberdana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan.

Pada tahun 2013 sudah terjadi beberapa kali penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat yang secara keseluruhan sebesar Rp64.212.950.948,00.

**19) EKUITAS DANA LANCAR.....673.425.465.049,40    225.338.806.256,38**

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 senilai Rp673.425.465.049,40 dan Rp225.338.806.256,38 merupakan selisih aset lancar dengan utang lancar dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .....	Rp 294.245.909.954,00
- Pendapatan yang Ditangguhkan .....	Rp        9.675.195,00
- Cadangan Piutang .....	Rp 364.140.781.119,40
- Cadangan Persediaan .....	Rp 15.281.768.743,00
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek .....	(Rp    252.669.962,00)
Jumlah .....	Rp 673.425.465.049,40

**20) EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN ....4.700.081.254.331,15    4.185.186.329.473,02**

Saldo Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.700.081.254.331,15 dan sebesar Rp4.185.186.329.473,02 yang merupakan selisih nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan hutang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang .....	Rp    327.182.389.693,15
- Dana yang diinventasikan dalam Aset Tetap .....	Rp4.293.251.424.738,00
- Dana yang diinventasikan dalam Aset Lainnya .....	Rp    143.860.390.848,00
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang .....	(Rp    64.212.950.948,00)
- Jumlah .....	Rp    4.700.081.254.331,15

	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

<b>21) EKUITAS DANA CADANGAN.....</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
---------------------------------------	-------------	--------------------------

Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2013 adalah Rp,00. Adapun pembentukan dana cadangan untuk pilkada pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

-saldo awal per 31 desember 2012...Rp	25.000.000.000,00
-penambahan tahun 2013.....Rp	5.000.000.000,00
-bunga deposito.....Rp	407.146.681,00
Jumlah.....Rp	30.407.146.681,00
-Pencairan/pengurangan.....(Rp)	(30.407.146.681,00)
Saldo per 31 desember 2013.....Rp	0,00

*(Rincian Dana cadangan pada Lampiran 9)*

### 3.3. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

#### 1). Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

#### 2). Definisi Arus Kas

- Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

#### 3). Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

- Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
- Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
- Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan.

Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.

- Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

#### 4). Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp294.245.909.954,00,00 (terdiri dari kas di BUD sebesar Rp293.517.712.205,00; kas di Bendahara Pengeluaran yang berupa sisa UP tahun 2013 sebesar Rp719.428.209,00; dan sisa UP tahun 2012 sebesar Rp8.769.540,00,00), dan sebesar Rp167.060.005.481,00 (terdiri dari kas di BUD sebesar Rp166.713.638.494,00 dan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp346.366.987,00). Posisi kas di BUD mengalami kenaikan sebesar Rp127.185.904.473,00. Kenaikan di BUD selama satu tahun anggaran tersebut dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari:

(1).	Aktivitas Operasi	Rp.	1.574.149.175.748,00
(2).	Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan	Rp.	222.833.210,00
(3).	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	30.878.794.681,00
(4).	Aktivitas Nonanggaran	Rp.	105.208.756.491,00
	Jumlah	Rp.	1.710.459.560.130,00

Arus Kas Keluar dari:

(1).	Aktivitas Operasi	Rp.	1.197.824.312.086,00
(2).	Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan	Rp.	224.308.059.020,00
(3).	Aktivitas Pembiayaan	Rp.	55.932.528.060,00
(4).	Aktivitas Nonanggaran	Rp.	105.208.756.491,00
	Jumlah	Rp.	1.583.273.655.657,00

Sehingga Kenaikan Kas adalah:

(1).	Arus Kas Masuk	Rp.	1.710.459.560.130,00
(2).	Arus Kas Keluar	Rp.	1.583.273.655.657,00
	Jumlah	Rp.	127.185.904.473,00

#### 5). Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp376.324.863.662,00 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut :

Arus Masuk Kas	Rp.	1.574.149.175.748,00
Arus Keluar kas	Rp.	1.197.824.312.086,00
Kenaikan Arus Kas Bersih	Rp.	376.324.863.662,00

#### 5.1). Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.574.149.175.748,00 terdiri dari:

Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	341.419.704.885,00
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.	73.636.737.984,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	19.568.717.822,00
Lain-lain PAD yang Sah	Rp.	29.847.886.584,00
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.	62.177.975.480,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp.	24.608.953.282,00
Dana Alokasi Umum	Rp.	686.520.759.000,00
Dana Alokasi Khusus	Rp.	19.667.663.000,00
Dana Penyesuaian	Rp.	154.905.086.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	84.256.026.891,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp.	50.133.320.544,00
Pendapatan Lainnya	Rp.	27.406.344.276,00
Jumlah	Rp.	1.574.149.175.748,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp341.419.704.885,00,00 terdiri dari :

- Pajak Hotel Bintang Empat	Rp.	716.306.959,00
- Pajak Hotel Bintang Tiga	Rp.	30.816.533.968,00
- Pajak Hotel Bintang Dua	Rp.	3.073.884.527,00
- Pajak Hotel Bintang Satu	Rp.	3.715.195.045,00
- Pajak Hotel Melati Tiga	Rp.	872.377.946,00



- Pajak Hotel Melati Dua	Rp.	836.623.304,00
- Pajak Hotel Melati Satu	Rp.	1.475.439.038,00
- Pajak Cottage	Rp.	203.219.188,00
- Pajak Losmen/Rumah Penginapan	Rp.	18.540.000,00
- Pajak Restoran	Rp.	32.621.158.814,00
- Pajak Rumah Makan	Rp.	15.785.329.449,00
- Pajak Kafetaria	Rp.	856.177.496,00
- Pajak Jasa Boga	Rp.	772.391.990,00
- Pajak Tontonan Film/Bioskop	Rp.	5.776.444.954,00
- Pajak Kesenian/Musik/Tari/Busana	Rp.	42.181.314,00
- Pajak Diskotik	Rp.	101.561.775,00
- Pajak Karaoke	Rp.	2.612.401.562,00
- Pajak Permainan Bilyar	Rp.	107.115.798,00
- Pajak Permainan Golf	Rp.	119.881.041,00
- Pajak Permainan Ketangkasan	Rp.	6.759.132.767,00
- Pajak Panti Pijat / Refleksi	Rp.	36.939.250,00
- Pajak Mandi Uap/Spa	Rp.	101.161.109,00
- Pajak Pusat Kebugaran	Rp.	118.929.663,00
- Pajak Pertandingan Olahraga	Rp.	300.000,00
- Pajak Reklame Papan/Bilboard/ Videotron/Megatron	Rp.	8.636.790.555,00
- Pajak Reklame Kain	Rp.	2.413.876.225,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker	Rp.	11.400.000,00
- Pajak Reklame Selebaran	Rp.	1.017.500,00
- Pajak Reklame Berjalan	Rp.	273.843.750,00
- Pajak Reklame Udara	Rp.	144.375.000,00
- Pajak Penerangan Jalan	Rp.	19.788.975.728,00
- Pajak Parkir	Rp.	5.797.071.513,00
- Pajak Air Tanah	Rp.	6.376.945.086,00
- BPHTB	Rp.	121.137.058.901,00
- PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp.	69.299.123.670,00
Jumlah	Rp.	341.419.704.885,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp73.636.737.984,00 terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp.	8.596.202.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp.	7.210.796.617,00
- Retribusi Biaya Cetak Pelayanan	Rp.	500.675.000,00

Kependudukan		
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat	Rp.	376.952.500,00
- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp.	1.635.203.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	1.011.304.500,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp.	64.927.000,00
- Retribusi Kipem /SKTS	Rp.	20.400.000,00
- Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	Rp.	22.825.910,00
- Retribusi Pelayanan Penggantian Akte Catatan Sipil	Rp.	495.675.000,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Rp.	94.350.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.	686.400.000,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	1.256.241.740,00
- Retribusi Terminal	Rp.	1.684.975.000,00
- Retribusi Tempat Khusus parkir	Rp.	163.152.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp.	509.810.800,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	844.363.000,00
- Retribusi Pemakaian Alat Berat	Rp.	110.385.000,00
- Retribusi Kekayaan Daerah	Rp.	14.600.000,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp.	39.503.338.756,00
- Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	Rp.	7.971.203.689,00
- Retribusi Izin Trayek	Rp.	534.262.500,00
- Retribusi izin Jalan Masuk/Galian/Reklame	Rp.	328.693.972,00
Jumlah	Rp.	73.636.737.984,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp19.568.717.822,00 terdiri dari:

- Bagian Laba PDAM Kota Bogor	Rp.	15.122.405.000,00
- Bagian Laba PD BPR Bank Pasar	Rp.	1.213.970.873,00
- Bagian Laba PT Bank Jabar	Rp.	3.199.843.801,00
- Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	Rp.	32.498.148,00
Jumlah	Rp.	19.568.717.822,00

Arus masuk kas dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp29.847.886.584,00 terdiri dari:

- Jasa giro Kas Daerah	Rp.	11.187.993.661,00
- Bunga atas Penerusan Pinjaman	Rp.	993.071.158,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp.	625.715.265,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp.	265.913.535,00

- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp.	52.952.330,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp.	446.357.842,00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp.	12.293.583,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	Rp.	12.241.055,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.	4.282.578.399,00
- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp.	115.721.193,00
- Pendapatan Denda retribusi Jasa Umum	Rp.	102.451.000,00
- Pendapatan dari Pengembalian	Rp.	8.167.681.860,00
- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Los/ Kios	Rp.	96.153.008,00
- Kontribusi Kebun Raya Bogor	Rp.	893.808.100,00
- Kontribusi Yayasan R.S Karya Bhakti	Rp.	284.130.000,00
- Jasa Pihak Ketiga Lainnya	Rp.	2.308.824.595,00
Jumlah	Rp.	<u>29.847.886.584,00</u>

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp62.177.975.480,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil PBB	Rp.	15.388.982.115,00
- Bagi Hasil PPh Pasal 25	Rp.	3.268.032.606,00
- Bagi Hasil PPh Perseorangan/PPh 21	Rp.	40.401.521.874,00
- Bagi Hasil Cukai	Rp.	3.119.438.885,00
Jumlah	Rp.	<u>62.177.975.480,00</u>

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 24.608.953.282,00 merupakan Bagi Hasil dari:

- Pungutan Hasil Perikanan	Rp.	347.408.873,00
- Pertambangan Minyak Bumi	Rp.	10.465.509.844,00
- Pertambangan Gas Bumi	Rp.	6.004.805.820,00
- Pertambangan Panas Bumi	Rp.	7.107.166.152,00
- Pertambangan Umum	Rp.	533.707.379,00
- Bagi Hasil Peredaran Hasil Hutan	Rp.	150.355.214,00
Jumlah	Rp.	<u>24.608.953.282,00</u>

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp686.520.759.000,00

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp19.667.663.000,00

Arus masuk Kas dari Dana Penyesuaian sebesar Rp154.905.086.000,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp84.256.026.891,00 terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp.	47.007.395.160,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp.	37.095.752.635,00
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp.	152.879.096,00
Jumlah	Rp.	84.256.026.891,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp50.133.320.544,00 terdiri dari:

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp.	50.072.835.666,00
- Kemetropolitan	Rp.	60.484.878,00
Jumlah	Rp.	50.133.320.544,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya Rp27.406.344.276,00

#### 5.2). Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp1.197.824.312.086,00 Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp.	754.650.690.499,00
Belanja Barang	Rp.	349.545.992.987,00
Belanja Bunga	Rp.	993.071.158,00
Belanja Hibah	Rp.	66.125.573.760,00
Bantuan Sosial	Rp.	22.061.276.246,00
Belanja Tak Terduga	Rp.	3.592.797.109,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	854.910.327,00
Jumlah	Rp.	1.197.824.312.086,00

#### 6). Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset non keuangan adalah sebesar Rp224.085.225.810,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp.	222.833.210,00
Arus Keluar Kas	Rp.	224.308.059.020,00
Penurunan Arus Kas Bersih	(Rp.)	224.085.225.810,00)

**6.1). Arus Masuk Kas**

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan adalah sebesar Rp222.833.210,00 Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Pelepasan Hak atas Tanah	Rp.	219.633.210,00
- TGR-Kerugian Barang	Rp.	3.200.000,00
Jumlah	Rp.	222.833.210,00

**6.2). Arus Keluar Kas**

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar Rp224.308.059.020,00 adalah belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2013, yang terdiri dari:

Belanja Tanah	Rp.	28.360.961.080,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	49.690.212.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	72.585.240.138,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp.	72.623.781.412,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.047.864.390,00
Jumlah	Rp.	224.308.059.020,00

**7). Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp25.053.733.379,00 merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp.	30.878.794.681,00
Arus Kas Keluar	Rp.	55.932.528.060,00
Penurunan Kas	(Rp.)	25.053.733.379,00)

**7.1). Arus Masuk Kas**

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp30.878.794.681,00 terdiri dari Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp30.407.146.681,00 dan penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp471.648.000,00

**7.2). Arus Keluar Kas**

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar Rp55.932.528.060,00 terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Pasar	Rp.	10.000.000.000,00
- Penyertaan Modal pada PDAM	Rp.	25.310.640.294,00
- Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan Jaya	Rp.	5.000.000.000,00
- Penyertaan Modal pada PD Jasa Transportasi	Rp.	4.000.000.000,00
- Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	936.048.000,00
- Pembayaran Pokok Hutang	Rp.	5.685.839.766,00
- Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah	Rp.	55.932.528.060,00

**8). Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran**

Arus Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp0,00 Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas masuk	Rp.	105.208.756.491,00
Arus Kas Keluar	Rp.	105.208.756.491,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	0,00

**8.1). Arus Masuk Kas**

Arus masuk kas dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp105.208.756.491,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Iuran Wajib Pegawai	Rp.	34.274.390.282,00
- Tabungan Perumahan Pegawai	Rp.	793.208.000,00
- PPh pasal 21	Rp.	28.802.136.077,00
- PPh pasal 22	Rp.	1.715.809.198,00
- PPh pasal 23	Rp.	5.398.727.263,00
- PPh pasal 26	Rp.	12.600.040,00
- PPh lainnya	Rp.	3.270.710,00
- PPN	Rp.	34.208.614.921,00
Jumlah	Rp.	105.208.756.491,00

**8.2). Arus Keluar Kas**

Arus keluar kas dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp105.208.756.491,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Iuran Wajib Pegawai	Rp.	34.274.390.282,00
- Tabungan Perumahan Pegawai	Rp.	793.208.000,00
- PPh pasal 21	Rp.	28.802.136.077,00
- PPh pasal 22	Rp.	1.715.809.198,00
- PPh pasal 23	Rp.	5.398.727.263,00
- PPh pasal 26	Rp.	12.600.040,00
- PPh lainnya	Rp.	3.270.710,00
- PPN	Rp.	34.208.614.921,00
Jumlah	Rp.	<u>Rp105.208.756.491,00</u>

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas serta Kebijakan akuntansinya.